



## Analisis Pelayanan Publik dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Tantangan dan Solusi Menuju Pencapaian Tujuan Tanpa Kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Hendri Gunawan<sup>1\*</sup>, Nora Eka Putri<sup>2</sup>, Genius Umar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang,  
Sumatera Barat, Indonesia, 25132

\*Penulis Korespondensi: [hendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com](mailto:hendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com)

**Abstract.** *Poverty remains one of the major development challenges faced by local governments in Indonesia. Social assistance programs are implemented as part of social protection policies to improve community welfare and reduce poverty levels. This study aims to analyze the quality of public services in the distribution of social assistance by the Social Service Office of Kerinci Regency and its contribution to poverty alleviation efforts. The research employed a qualitative descriptive approach using secondary data obtained through document analysis. Data sources included statistical publications, government regulations, policy documents, and relevant scientific literature concerning poverty, social assistance, and public services. Data were analyzed using descriptive qualitative techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the effectiveness of social assistance distribution is strongly influenced by the quality of public services, the accuracy of beneficiary data, and the implementation of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) system. Public services that are transparent, accountable, responsive, and accessible contribute significantly to ensuring that social assistance reaches eligible beneficiaries. Furthermore, social assistance programs play an important role in improving community welfare and supporting poverty reduction efforts in Kerinci Regency. The study concludes that improving public service quality and strengthening beneficiary data management are essential to enhancing the effectiveness of social assistance programs and achieving sustainable poverty reduction goals. The findings provide practical implications for local governments in improving social service delivery and strengthening poverty alleviation policies.*

**Keywords:** *DTKS; poverty alleviation; public service; social assistance; social welfare*

**Abstrak.** Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Program bantuan sosial dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci serta kontribusinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi publikasi statistik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan kemiskinan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, akurasi data penerima manfaat, serta penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan mudah diakses berkontribusi dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, program bantuan sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengelolaan data penerima manfaat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** bantuan sosial; DTKS; kesejahteraan sosial; pelayanan publik; pengentasan kemiskinan

## **1. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama yang menargetkan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas (United Nations, 2024). Upaya tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam merancang dan melaksanakan berbagai program yang mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan secara efektif.

Di Indonesia, program bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Ainulyaqin et al. (2023), keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola program secara efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang masih menghadapi tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci (2025), jumlah penduduk Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 270 ribu jiwa dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar berada pada kawasan perdesaan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2025) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kerinci mencapai 7,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidupnya.

Keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data penerima manfaat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama dalam pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa DTKS digunakan sebagai dasar penetapan sasaran penerima program perlindungan sosial dan bantuan sosial sehingga keakuratan serta pemutakhiran data menjadi faktor penting dalam menjamin ketepatan sasaran program (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Selain aspek data, kualitas pelayanan publik juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Dalam penyaluran bantuan sosial, pelayanan yang berkualitas akan mempermudah masyarakat memperoleh haknya sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial memiliki kontribusi penting terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Idris et al. (2023) menemukan bahwa program Rumah Layak Huni mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan. Islami dan Mursyidah (2024) menjelaskan bahwa implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan didukung pelayanan yang baik. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sulastri et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan pangan dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor pelaksana dan efektivitas mekanisme distribusi bantuan.

Di sisi lain, Rahma et al. (2025) mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam mekanisme bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan validitas data kemiskinan dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian mengenai kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan dari berbagai perspektif. Andriani (2024) menunjukkan bahwa program pembangunan desa memiliki hubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Ainulyaqin et al. (2023) menekankan

pentingnya peran program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Idris et al. (2023), Islami dan Mursyidah (2024), serta Sulastri et al. (2025) lebih banyak berfokus pada efektivitas implementasi program bantuan sosial tertentu. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang terletak pada belum banyaknya kajian yang menghubungkan aspek pelayanan publik dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas program bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial (United Nations, 2024). Data Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan garis kemiskinan untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025).

Menurut Rahma et al. (2025), kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya kesempatan kerja, serta belum optimalnya efektivitas program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi semata, melainkan memerlukan

intervensi pemerintah yang terintegrasi melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar yang tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **2.2 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, serta profesionalisme guna memberikan kepuasan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Dalam bantuan sosial, kualitas pelayanan publik menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **2.3 Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial**

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial. Program bantuan sosial bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Ainulyaqin et al. (2023) menjelaskan bahwa program pemerintah yang dirancang secara tepat dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Idris et al. (2023) menunjukkan bahwa program bantuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat mampu mendukung pengurangan kemiskinan. Sementara itu, penelitian Islami dan Mursyidah (2024) serta Sulastri et al. (2025) membuktikan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, koordinasi pelaksana, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

## **2.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan sistem data yang digunakan pemerintah sebagai dasar penetapan sasaran berbagai program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, DTKS memuat data individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang memiliki status kesejahteraan sosial tertentu sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Keakuratan DTKS sangat menentukan keberhasilan program bantuan sosial karena menjadi dasar dalam proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat. Oleh sebab itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi kebutuhan penting untuk meminimalkan kesalahan sasaran dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Andriani (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan desa memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Rahma et al. (2025) mengungkapkan bahwa validitas data kemiskinan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Selain itu, penelitian Idris et al. (2023), Islami dan Mursyidah (2024), serta Sulastri et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, koordinasi pelaksana, dan akurasi data penerima manfaat.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dan akurasi data penerima manfaat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelayanan publik dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan kebijakan publik berdasarkan data yang tersedia (Geuder, 2025).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dokumen Sustainable Development Goals (SDGs), serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kemiskinan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kerinci.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kerinci**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2025), persentase penduduk miskin di Kabupaten Kerinci mencapai 7,48 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga memerlukan dukungan program perlindungan sosial dari pemerintah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci (2025) mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 270 ribu jiwa. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengurangan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan global yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap perlindungan sosial, pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan kerja yang layak, serta

pemberdayaan kelompok rentan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan (United Nations, 2024). Oleh karena itu, efektivitas penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2 Peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

Keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas data penerima manfaat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan sasaran berbagai program kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

Keberadaan DTKS memberikan manfaat dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang termasuk kategori miskin, rentan miskin, dan kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial. Namun demikian, efektivitas DTKS sangat bergantung pada proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Data yang tidak diperbarui berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan.

Hasil penelitian Rahma et al. (2025) menunjukkan bahwa validitas data kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data penerima manfaat.

#### **4.3 Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Dalam penyaluran bantuan sosial, kualitas pelayanan dapat dilihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap informasi program, kejelasan prosedur pelayanan, ketepatan waktu penyaluran bantuan, serta kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian Islami dan Mursyidah (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sulastri et al. (2025) yang menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara pelaksana program dan masyarakat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi bantuan sosial.

#### **4.4 Kontribusi Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Program bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak kerentanan ekonomi. Menurut Ainulyaqin et al. (2023), berbagai program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian Idris et al. (2023) menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah yang diberikan secara tepat sasaran mampu mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diterima masyarakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Dalam Kabupaten Kerinci, keberadaan program bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran bantuan perlu terus dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima.

#### **4.5 Implikasi terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pelaksanaan bantuan sosial yang efektif memiliki kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Goal 1 yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. United Nations (2024) menegaskan bahwa

perlindungan sosial merupakan salah satu strategi utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat.

Hasil penelitian Andriani (2024) menunjukkan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan global.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik, akurasi DTKS, dan efektivitas program bantuan sosial merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kerinci. Semakin baik kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran bantuan yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi program bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Efektivitas penyaluran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Keberadaan DTKS sebagai basis data penerima bantuan sosial menjadi instrumen penting dalam menentukan sasaran program, sementara pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan bantuan sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan

koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait dalam proses pemutakhiran DTKS. Upaya tersebut penting untuk meminimalkan kesalahan sasaran penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelayanan bantuan sosial perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung pengalaman masyarakat penerima bantuan maupun perspektif pelaksana program di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, atau survei untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menjadi dasar yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan peningkatan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ainulyaqin, M., Sakum, S., & Edy, S. (2023). Peran program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3643–3652. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Andriani, I. (2024). Hubungan pelaksanaan program dana desa bidang ketahanan pangan terhadap persepsi masyarakat tentang pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomi Bisnis*. <https://repository.unja.ac.id/65371/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. (2025). *Kabupaten Kerinci dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. <https://kerincikab.bps.go.id/publication/2025/02/28/62cf9478ce035aac08bcdf2a/kabupaten-kerinci-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. <https://jambi.bps.go.id>
- Geuder, J. (2025). 3. *Research Design and Methodology*. 58–82. <https://doi.org/10.5771/9783748955993-58>
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). Efektifitas program rumah layak huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia*, 12(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3240>
- Islami, S., & Mursyidah, L. (2024). Implementasi program bantuan pangan non tunai

(BPNT) dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7, 64–81. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171535/permensos-no-3-tahun-2021>

Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., Afif, A., Syari'ah, E., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). Menggali akar permasalahan: Kajian mendalam terhadap data kemiskinan dan mekanisme bantuan sosial. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 192–198. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/93>

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/147/t/undangundang%2Bnomor%2B25%2Btahun%2B2009%2Btanggal%2B18%2Bjuli%2B2009](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/147/t/undangundang%2Bnomor%2B25%2Btahun%2B2009%2Btanggal%2B18%2Bjuli%2B2009)

Sulastrri, E., Solihin, D., & Pelita Nusa Bandung Barat, S. (2025). Implementasi penyaluran program bantuan pangan non-tunai pada masyarakat Desa Gunung Masigit. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–18. <https://jurnal.staipelitanusa.ac.id/index.php/jpn>

United Nations. (2024). *Goal 1: End poverty in all its forms everywhere*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal1>